

BANGUNAN

2021

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD, 2021/NO. 8 TLD No 8. SETDA

KOTA YOGYAKARTA: 46 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG BANGUNAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 7 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Fungsi dari beberapa jenis bangunan diantaranya Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB), Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK), Bangunan Gedung Hijau (BGH), Bangunan Gedung Negara (BGN). Kawasan Cagar Budaya (KCB), Kawasan Warisan Budaya (KWB), dan Bangunan Gedung Tertentu. Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga tentang: Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Standar Teknis Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Pemanfaatan Bangunan Gedung,, Pelestarian-Perawatan-Pemeliharaan Gedung, Pemeriksaan Berkala, Pembongkaran, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), Pemilik Bangunan Gedung, Penggunaan Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Penilik Bangunan Gedung, Sekretariat Tim Profesi Ahli Tim, Prasarana dan Sarana. Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang akan didirikan dari awal telah ditetapkan fungsinya, sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung dapat memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien. Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai Penyelenggaraan Bangunan Gedung, sedangkan ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 26 September 2022
 - Dengan berlakunya Perda ini maka Perda Nomor 2 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.